

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Praktik pendidikan inklusif sudah menjadi tren global yang telah dilakukan oleh berbagai negara lebih dari 20 tahun semenjak *Salamanca Statement* dikeluarkan pada tahun 1994. Di Indonesia sendiri, pemerintah secara intens terus mengembangkan dan mendorong penyelenggaraan pendidikan inklusif. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No.70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa, pendidikan inklusif didefinisikan sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Melalui pendidikan inklusif ini terciptanya sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif bukan semata-mata menempatkan anak berkebutuhan khusus secara fisik belajar diruangan atau lingkungan yang sama dengan anak-anak reguler. Lebih jauh dari itu, bahwa melalui pendidikan inklusif ini segala komponen pendidikan harus mampu mendukung dan memberikan layanan pendidikan yang memenuhi kebutuhan dan mengembangkan potensi semua anak. Namun, setelah beberapa tahun diimplementasikan, tampaknya pendidikan inklusif menghadapi banyak tantangan, misalnya kebijakan yang tidak tepat (Forbes 2007), kurangnya dukungan (Hwang & Evans, 2011), pelatihan yang kurang memadai (Rajovic & Jovanovic, 2011), dan sikap guru (Unianu, 2012).

Efektivitas pendidikan inklusif dipercayai tergantung pada peran guru. Baik guru reguler maupun guru pendidikan khusus merupakan agen utama dalam menciptakan lingkungan yang paling tidak membatasi di kelas mereka. Namun, salah satu isu yang masih menyeruak yaitu mengenai kekurangmampuan dan kekurangsiapan guru reguler dalam memberikan layanan pendidikan kepada anak

berkebutuhan khusus yang ada dikelasnya (Garnida, 2015). Guru reguler berlatar belakang bukan dari lulusan pendidikan khusus cenderung kurang memiliki pengalaman dan kurang terampil dalam menangani anak berkebutuhan khusus yang ada dikelasnya dibandingkan dengan guru lulusan pendidikan khusus. Walaupun pemerintah telah mewajibkan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif untuk menyediakan minimal satu guru pendamping khusus sebagaimana telah diatur dalam Permendiknas No.70 Tahun 2009, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak sekolah inklusif yang tidak menyediakan dan tidak memiliki guru pendamping khusus. Tidak adanya peran guru pendamping khusus sebagai patner kerja guru reguler, pada akhirnya mengharuskan guru reguler menjadi ujung tombak dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran bagi semua anak. Kekurangsiapan dan berbagai kesulitan yang dialami oleh guru reguler dapat memengaruhi sikapnya terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif.

Sikap dapat didefinisikan secara sederhana sebagai “suka” dan “tidak suka” (Bem, 1970 dalam Schwarz & Bohner, 2001). Dalam istilah yang lebih luas, sikap dapat didefinisikan sebagai predisposisi individu dalam berpikir (komponen kognitif), merasakan (komponen afektif), dan bertindak laku (komponen perilaku) dengan cara tertentu terhadap target tertentu yang dituju (Arnold & Randall, 2010). Pengalaman-pengalaman di masa lalu, kondisi yang dihadapi saat ini, dan harapan-harapan di masa depan dapat memengaruhi sikap seseorang (Azwar, 2016). Adapun dalam kaitannya dengan pendidikan inklusif, sikap guru mengacu pada cara guru berpikir, apa yang guru rasakan, dan bagaimana guru berperilaku terhadap hal pendidikan inklusif.

Mengetahui sikap guru terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif menjadi penting terlepas dari sikap positif atau sikap negatif yang ditunjukkan. De Boer, Pijl, & Minnaert (2010) menyatakan bahwa sikap dan harapan positif guru penting bagi keberhasilan pendidikan inklusif. Guru yang memiliki sikap positif terhadap pendidikan inklusif cenderung lebih siap untuk menyesuaikan pendekatan mereka agar dapat menjawab kebutuhan belajar peserta didik yang berbeda-beda (Subban & Sharma, 2006). Guru yang memiliki sikap positif terhadap pendidikan inklusif akan memahami keberagaman peserta didik dan meresponnya dalam

pembelajaran. Sedangkan guru yang memiliki sikap negatif dapat tercermin dari tindakannya yang tidak ramah pada semua anak dan pembelajarannya yang tidak fleksibel. Bila sikap positif guru penting bagi keberhasilan pendidikan inklusif, maka sikap negatif guru terhadap pendidikan inklusif dapat menjadi penghambat pelaksanaan pendidikan inklusif itu sendiri sehingga harus dicari solusinya agar sikap guru dapat menuju arah yang positif demi penyelenggaraan dan perkembangan pendidikan inklusif yang lebih baik.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, saat ini Kota Sukabumi telah memiliki sekolah-sekolah inklusif baik pada jenjang Sekolah Dasar (SD)/ sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ sederajat, dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat. Pada jenjang SMA/ sederajat, sekolah inklusif telah diselenggarakan oleh beberapa sekolah baik yang bestatus sekolah swasta maupun sekolah negeri. Di Kota Sukabumi terdapat lima SMA Negeri yang menerapkan pendidikan inklusif, sehingga orang tua dari anak berkebutuhan khusus yang ingin anaknya melanjutkan pendidikan ke SMA inklusif akan lebih memprioritaskan anaknya untuk bersekolah disalah satu sekolah dari kelima SMA Negeri tersebut.

Penelitian mengenai sikap guru terhadap pendidikan inklusif sudah dilakukan oleh beberapa akademisi. Namun, penelitian serupa belum pernah dilakukan di Kota Sukabumi. Menjadi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dengan guru-guru yang tidak memiliki latar belakang pendidikan khusus, membuat penulis menganggap perlu adanya penelitian mengenai sikap guru reguler terhadap pendidikan inklusif. Penulis ingin menggambarkan sikap guru SMA Negeri di Kota Sukabumi terhadap pendidikan inklusif, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan atau masukan kepada pihak terkait terutama dinas pendidikan dalam mengoptimalkan keberhasilan pendidikan inklusif.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah dalam penelitian ini secara umum adalah mengenai “Bagaimanakah sikap guru SMA Negeri di Kota Sukabumi terhadap pendidikan

inklusif?” yang diungkap melalui tiga pertanyaan mengenai sikap guru terhadap pendidikan inklusif sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sikap guru terhadap konsep dan prinsip dalam pendidikan inklusif?
2. Bagaimanakah sikap guru terhadap landasan pendidikan inklusif?
3. Bagaimanakah sikap guru terhadap tugas guru dalam pelaksanaan pendidikan inklusif?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya. Tujuan secara umum yaitu untuk menggambarkan sikap guru SMA Negeri di Kota Sukabumi terhadap pendidikan inklusif. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengungkap arah sikap guru terhadap konsep dan prinsip dalam pendidikan inklusif.
2. Untuk mengungkap arah sikap guru terhadap landasan pendidikan inklusif.
3. Untuk mengungkap arah sikap guru terhadap tugas guru dalam pelaksanaan pendidikan inklusif.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini memberikan gambaran sikap guru SMA Negeri terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif saat ini, sehingga dapat menjadi catatan literatur dalam perjalanan perkembangan pendidikan inklusif di Indonesia, khususnya di Kota Sukabumi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini sebagai sarana untuk mengimplementasikan dan menambah pengetahuan mengenai konsep sikap, pendidikan inklusif, dan metodologi penelitian.

- b. Bagi guru, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melaksanakan pendidikan inklusif dikelasnya.
- c. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan inklusif yang lebih baik.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini untuk mengetahui sikap guru terhadap pendidikan inklusif saat ini sehingga dapat dijadikan sumber informasi bagi penelitian lebih lanjut.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Berikut ini merupakan sistematika penulisan agar dapat mempermudah dalam pembahasan dan uraian secara terperinci

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian yang memaparkan konteks penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian yang akan dicapai, manfaat penelitian yang diharapkan, dan struktur organisasi skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi kajian pustaka yang terdiri atas kajian tentang sikap (pengertian sikap, komponen sikap, dimensi sikap, faktor-faktor pembentuk sikap), kajian tentang pendidikan inklusif (pengertian pendidikan inklusif, konsep-konsep utama pendidikan inklusif, prinsip-prinsip pendidikan inklusif, landasan pendidikan inklusif, dan tugas guru dalam pelaksanaan pendidikan inklusif), dan pemaparan mengenai penelitian terdahulu yang relevan serta kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang partisipan penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, prosedur penelitian, serta analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini mendeskripsikan temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, serta membahas temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pada bab ini berisi simpulan dan rekomendasi yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan penulis terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian.